



ABSTRAK

Tesis ini mengkaji bagaimana negara-negara *Global South* memanfaatkan posisi tawar (*leverage*) di G20 sebagai arena kontestasi dalam mendorong agenda sosial-pembangunan, dengan fokus pada agenda transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan transformasi digital melalui *Digital Public Infrastructure* (DPI). Dengan menggunakan pendekatan *global governance* melalui varian *power struggle*, tesis ini memandang G20 bukan sekadar forum koordinasi biasa, melainkan sebagai arena kontestasi yang membentuk ruang negosiasi dan pembentukan konsensus. Temuan utama menunjukkan bahwa negara-negara *Global South* memiliki kapasitas untuk mendorong perluasan agenda sosial-pembangunan melalui koalisi dan presidensi berurutan. Namun, posisi tawar tersebut sebagian besar terhenti pada tingkat pengakuan normatif dan belum berkembang menjadi komitmen kolektif yang terkonsolidasi. Hal ini dipengaruhi oleh karakter G20 yang tidak mengikat, ketergantungan pada konsensus, serta fragmentasi kepentingan di antara negara-negara *Global South*. Kontribusi studi ini terletak pada pemahaman G20 sebagai arena peluang sekaligus batas bagi *Global South*, serta menjembatani literatur yang terbelah antara optimisme dan skeptisisme.

Kata-kata kunci: G20; posisi tawar (*leverage*); *Global South*; kontestasi; agenda sosial-pembangunan

ABSTRACT

This thesis examines how Global South countries leverage the G20 as an arena of contestation to advance social-development agendas, with particular attention to the energy transition through the Just Energy Transition Partnership (JETP) and digital transformation through Digital Public Infrastructure (DPI). Drawing on a global governance approach informed by the power struggle variant, the thesis conceptualizes the G20 not merely as a forum for policy coordination, but as a contested arena in which spaces for negotiation and consensus formation are produced. The main findings demonstrate that Global South countries possess the capacity to promote the expansion of social-development agendas through issue-based coalitions and consecutive presidencies. However, such leverage largely remains confined to the level of normative recognition and has not evolved into consolidated collective commitments. This outcome is shaped by the non-binding character of the G20, its reliance on consensus-based decision-making, and the fragmentation of interests among Global South countries. The contribution of this study lies in advancing an understanding of the G20 as both an arena of opportunity and constraint for the Global South, while bridging a literature divided between optimism and skepticism.

Keywords: G20; leverage; Global South; contestation; social-development agenda